



KR-Antara/Aprillio Akbar

TARGET WISATAWAN NUSANTARA: Sejumlah warga berwisata saat libur cuti bersama Imlek 2023 di kawasan Kota Tua, Jakarta, Senin (23/1/2023). Kememparekrak menargetkan peningkatan pergerakan wisatawan di angka 1,2 miliar hingga 1,4 miliar jumlah perjalanan wisatawan Nusantara pada 2023.

PENUHI BERBAGAI PERSYARATAN

Tol Semarang-Demak Seksi 2 Siap Beroperasi

JAKARTA (KR) - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan, Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 Ruas Sayung-Demak, Jawa Tengah, siap beroperasi setelah mengantongi Sertifikat Laik Operasi.

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan, saat ini jalan tol tersebut telah selesai pembangunannya. "Tim Evaluasi Laik Fungsi Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 Ruas Sayung-Demak yang dibentuk Direktur Jenderal Bina Marga telah melaksanakan evaluasi laik fungsi dan merekomendasikan bahwa secara administrasi, teknis, dan sistem operasi, Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 Ruas Sayung-Demak dinyatakan laik fungsi, sehingga siap dioperasikan untuk umum," ujarnya

dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/1).

Menurut Danang Parikesit, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR telah menerbitkan Sertifikat Laik Operasi dengan nomor BM.0702-Db/1696 tertanggal 22 Desember 2022. "PT PP Semarang Demak selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi pengoperasian jalan tol. Selanjutnya, penetapan pengoperasian dan pemberlakuan tarif pada jalan tol tersebut akan ditetapkan melalui

Keputusan Menteri PUPR," kata Danang.

Tol Semarang-Demak memiliki panjang 26,40 km yang dibangun dalam dua seksi melalui skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pemerintah (KPBU).

Adapun Seksi 1 untuk Ruas Semarang/Kaligawe-Sayung sepanjang 10,39 km merupakan porsi Pemerintah dengan alokasi anggaran Rp 10 triliun yang bersumber dari APBN. Sementara, Seksi 2 Ruas Sayung-Demak sepanjang 16,01 km merupakan porsi BUJT yang dilaksanakan oleh PT PP-PT WIKI Konsorsium serta konsultan perencana Maratama-Studi Teknik (KSO) dengan konsultan supervisi PT Virama Karya (Persero) dengan nilai investasi Rp 5,93 triliun.

Kehadiran Tol Semarang-

Demak diharapkan dapat semakin melengkapi konektivitas jaringan jalan di wilayah Jawa Tengah bagian Utara sekaligus menjadi penghubung kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan kawasan pariwisata religi khususnya di wilayah Demak.

Di samping itu, dengan pembangunan jalan tol yang terintegrasi dengan tanggul laut ini, diharapkan permasalahan banjir rob di Semarang Timur khususnya Kaligawe-Sayung yang mengakibatkan kerugian ekonomi cukup signifikan, dapat teratasi pada akhir 2024. Terlebih dengan terbangunnya tanggul hingga tujuh lapis timbunan dan beroperasinya rumah pompa pada kolam retensi Terboyo dan Sriwulan.

(Ant/San)-d

PENANGANAN PERMASALAHAN PERTEMBAKAUAN

Revisi PP 109/2012 Bukan Solusi Tepat

YOGYA (KR) - Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dinilai bukan solusi yang tepat dalam menangani permasalahan pertembakauan di Indonesia. Hal itu berdasarkan peninjauan dampak usulan revisi PP 109/2012 secara komprehensif.

Ketua Umum Pakta Konsumen Ari Fatanen menyampaikan, substansi PP 109/2012 sudah cukup untuk mengatasi permasalahan terkait rokok, hanya masih lemah dalam praktiknya. PP 109/2012 sudah melarang keterlibatan anak-anak di bawah 18 tahun dalam aktivitas jual-beli hingga promosi rokok.

"Makanya bahwa prevalensi perokok itu dikaitkan dengan revisi PP 109/2012, menurut saya yang dilakukan Pemerintah tidak fair. Revisi PP 109/2012 tidak akan mengubah apapun apabila Pemerintah tidak memberikan hak partisipasi bagi konsumen dalam perumusan kebijakan dan mendorong keterlibatan konsumen dalam gerakan penyuluhan rokok bersama bagi nonperokok,

termasuk anak di bawah umur," papar Ari Fatanen, Senin (23/1), terkait Dialog Kebijakan Multipihak 'Upaya Membangun Kesejahteraan Bersama Tentang Kebijakan Pertembakauan Indonesia' di Yogya baru-baru ini.

Dialog ditujukan untuk meninjau dan menanggapi poin revisi PP 109/2012 yang diusulkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 25 Tahun 2022, Desember lalu. Dialog menghadirkan narasumber Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (PP FSP RTMM-SPSI), PD FSP RTMM-SPSI DIY, Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK), Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Pakta Konsumen, dan akademisi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

Sekjen AMTI Hananto Wibisono menyoroti ketidaksesuaian data Pemerintah dengan kondisi riil perokok saat ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) telah menunjukkan penurunan angka perokok anak berusia 18 tahun ke bawah sejak empat tahun terakhir. Namun, Pemerintah tetap merujuk data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 sebagai

dasar usulan revisi PP 109/2012 dalam Keppres 25/2022.

Di samping itu, alasan Pemerintah dalam mendorong revisi tidak konsisten dan tidak berdasarkan hasil evaluasi. "Evaluasi saja belum, sudah berbicara tentang revisi. Hadirnya PP itu sudah mengurangi jumlah produksi rokok. Jumlah prevalensi perokok anak juga turun. Kok Pemerintah memperlakukan rokok sebagai produk legal yang perlakuannya ilegal," ucap Hananto.

Sikap Pemerintah itu dinilainya diskriminatif dan mengancam keberadaan ekosistem tembakau dengan merugikan sekitar 2 juta petani tembakau, 2 juta peritel, 1,5 juta petani cengkeh, 600.000 karyawan, dan negara sendiri.

Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI Sudarto AS menyatakan, revisi PP 109/2012 menempatkan buruh rokok sebagai korban dan tidak akomodatif terhadap kelompok tembakau. Tidak hanya dari Pemerintah yang condong terhadap isu kesehatan, tekanan peraturan juga didapatkan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengancam keberlanjutan sawah ladang pekerja.

(San)-d

KOORDINASI DENGAN KEJAGUNG DAN KPK

Erick Siap Ungkap Kasus Hukum di BUMN

JAKARTA (KR) - Menteri BUMN Erick Thohir secara tegas tidak segan-segan untuk mengungkap kasus-kasus hukum di lingkungan BUMN. Termasuk intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh perusahaan pelat merah.

"Untuk masalah bersih-bersih BUMN, saya rasa saya tidak segan-segan mendorong yang namanya kasus-kasus hukum di BUMN, kasus Jiwasraya dari 2006 itu tidak pernah dilakukan, ketegasan, tetapi Alhamdulillah saya melaporkan kepada Pak Presiden Joko Widodo dan beliau sangat mendukung," ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Erick menilai pengungkapan Jiwasraya hanya permulaan lantaran

banyak juga dana pensiun di BUMN yang bermasalah. "Kemarin saya peringatkan, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar," katanya.

Erick juga menyebut kasus yang terjadi di Garuda Indonesia hingga Waskita Beton yang berdampak negatif bagi keuangan perusahaan. Permasalahan tersebut memang terjadi cukup lama, namun dirinya tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya agar tidak merugikan negara dan masyarakat.

"Waskita Beton ini juga terima kasih teman-teman penegak hukum

bisa menginformasikan, karena memang secara data waktu itu kita sudah melihat seperti ada penipuan. Artinya secara publik waktu itu mengeluarkan rights issue, surat utang atau apalah, saya lupa detailnya tetapi ternyata penggunaannya tidak benar," ujar Erick.

Ditambahkan, program bersih-bersih ini tentu tidak selesai dalam waktu singkat lantaran sudah terjadi sejak zaman dahulu. Namun, Erick meyakini pemilihan pemimpin berdasarkan kepemimpinan yang baik dan sistem yang dibangun ini yang akan bisa mengurangi korupsi. "Tidak mungkin yang namanya perubahan itu berdasarkan hanya kepemimpinan, tanpa ada sistem yang dibangun, maupun sebaliknya," tagasnya.

(Ant/Has)-d

PEMBAKARAN QURAN DI SWEDIA

Melukai Umat dan Menista Agama Islam

JAKARTA (KR) - Gelombang protes pembakaran kitab suci Alquran yang dilakukan di Stockholm Swedia 21 Januari lalu terus mengalir. Selain dari sejumlah seperti Malaysia, Turki dan Jordania, sejumlah kalangan dari Indonesia juga mengutuk keras pembakaran kitab suci umat Islam tersebut.

Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) misalnya, menyatakan tindakan pembakaran Alquran sebagai penistaan agama yang melukai hati umat Islam.

"Umat Islam dan ormas-ormas Islam di Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran Kitab Suci Alquran yang dilakukan politisi Swedia Rasmus Paludan di Stockholm Swedia," ujar Ketua Umum LPOI dan LPOK KH Said Aqil Siroj dalam keterangannya, Senin (23/1) di Jakarta

Sebelumnya Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memprotes dan mengutuk keras

tindakan tersebut. Aksi pembakaran Alquran itu menodai toleransi umat beragama serta mencederai perdamaian dunia.

Said Aqil menyerukan kepada semua pihak di seluruh dunia, khususnya kepada pemerintah Swedia dan Uni Eropa, untuk menghentikan rasisme dan kebencian terhadap Islam. "Stop aksi rasisme dan kebencian terhadap Islam. Tindak tegas, seadil-adilnya semua pelaku tindakan penistaan agama, khususnya pelaku pembakaran kitab suci Alquran, agar tidak memicu dan mengundang gelombang konflik horizontal yang merugikan perdamaian," tegas mantan Ketua Umum PB NU ini.

Kiai Said juga menyampaikan, dirinya yakin semangat perdamaian dan toleransi menjadi pijakan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Uni Eropa. "Uni Eropa dan Swedia khususnya harus lebih proaktif mendorong tumbuh berkembangnya toleransi dan perdamaian serta membuat regulasi yang kuat dan menerapkannya agar tidak sering terjadi aksi penistaan terhadap agama," katanya. (Ant/Obi)-d

GUNUNG ANAK KRAKATAU

Beberapa Kali Erupsi

LAMPUNG SELATAN (KR) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyampaikan informasi, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Provinsi Lampung, sejak Senin (23/1) dini hari beberapa kali mengalami erupsi.

Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau di Hargopancuran, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan Andi Suardi saat dihubungi dari Krui mengatakan, erupsi masih terjadi pada Senin (23/1) pagi.

PVMBG menyarankan masyarakat, pengunjung, wisatawan, maupun pendaki tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif gunung api tersebut, yang statusnya Siaga (Level III).

PVMBG mencatat erupsi Gunung Anak Krakatau terjadi pada Senin pukul 00.41 WIB dan pukul 04.42 WIB, tetapi abu letusannya tidak teramati. Erupsi selanjutnya terjadi pada pukul 06.07 WIB dengan tinggi kolom letusan sekitar 300 meter di atas puncak atau 457 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Letusan yang terekam seismograf memiliki amplitudo maksimum 50 mm dan durasi 80 detik itu menimbulkan kolom abu berwarna kelabu tebal mengarah ke Timur.

Pada pukul 07.01 WIB, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom letusan sekitar 300 meter di atas puncak atau 457 mdpl dan kolom abu berwarna kelabu tebal mengarah ke Timur. (Ant)-d

KEMENKOMINFO AJAK WARGANET

Santun dan Beretika pada Tahun Politik

JAKARTA (KR) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajak warganet untuk tetap bijak, santun, dan beretika dalam bermedia sosial saat memasuki tahun politik, guna meminimalisasi munculnya ujaran kebencian, hoaks, atau disinformasi politik.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong kepada Antara di Jakarta, Senin (23/1) juga mengimbau para pengguna media sosial agar beretika dalam pemilihan kata, diksi, dan lainnya.

"Dalam hal ini kita tahu warganet Indonesia terkadang termasuk kurang santun dalam bermedia sosial. Dalam konteks politik tentu kami mengedukasi pula bahwa ada etika politik yang harus dicermati dalam penggunaan media sosial," kata Usman.

Selain beretika, Kemenkominfo juga mengajak warganet untuk mengedepankan nilai-nilai budaya, ideologi Pancasila, bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika, kearifan lokal, serta nilai-nilai agama dalam berinteraksi di dunia maya.

Menurut Usman, selama ini Kemenkominfo berkomitmen untuk menjaga ruang digital publik, terlebih dalam kaitannya dengan tahun politik Pemilu 2024. Mekanisme yang disiapkan adalah menjaga ruang digital dari sisi hilir, te-

ngah, dan hilir.

"Dari hulu kami lakukan literasi digital yang sifatnya preventif dan edukatif melalui empat pilar, yaitu keterampilan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Di sinilah kami berupaya mengedukasi masyarakat dalam bermedia sosial, salah satunya dengan memperhatikan etika digital dan budaya digital," papar Usman.

Di hilir, kata Usman, Kemenkominfo memiliki mekanisme korektif untuk memantau konten-konten negatif atau terlarang seperti ujaran kebencian, hoaks, pornografi, atau disinformasi politik.

Mekanisme sisi ini, lanjutnya, bisa dimanfaatkan khalayak bila menemukan dugaan pornografi, disinformasi, hoaks, atau pun ujaran kebencian melalui laman aduankonten.id. "Kalau kami menemukan ada pelanggaran maka kami akan meminta platform untuk menurunkan (take down) konten terkait. Lalu dengan memanfaatkan media arus utama, kanal-kanal kami serta kementerian atau lembaga lain, kami sampaikan kepada publik bahwa informasi tadi bersifat hoaks atau terjadi disinformasi," ungkapnya.

Sedangkan di bagian hilir, dalam konteks Pemilu, Kemenkominfo berkoordinasi dengan Polri, KPU, dan Bawaslu untuk menindaklanjuti subjek yang terbukti telah melakukan pelanggaran.

(Ant/San)-d



KR-Antara/Okly Lukmansyah

WATERBOOM KEBUN BUAH: Sejumlah pengunjung menikmati wisata air di obyek wisata Waterboom Kebun Buah di Desa Lebenteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (23/1/2023). Warga memanfaatkan liburan Imlek untuk bertibur ke tempat wisata bersama keluarga.